PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 15 Juni 2026
Kepala Bapelitbangda

PADANG PARIAMAN

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman

RENCANA KERJA (RENJA)
2026

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 444/KEP/DPUPR-2025

RENCANA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 sebagimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :

a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.
b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada Tanggal 22 September 2025

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

EL ABDES MARSYAM, ST.MM
NIP. 19701219 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Aamiin**.**

Parit Malintang, 22 September 2025
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

EL ARDES MARSYAM, S.T, M.M
NIP. 19701219 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 9
1.3 Maksud dan Tujuan 11
1.4 Sistematika Penulisan 12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 17
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra 17
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 17
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 18
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan 18
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah 19
2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja 41
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 60
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 65
3.3 Program dan Kegiatan 68
BAB IV PENUTUP 100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang

telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas

program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

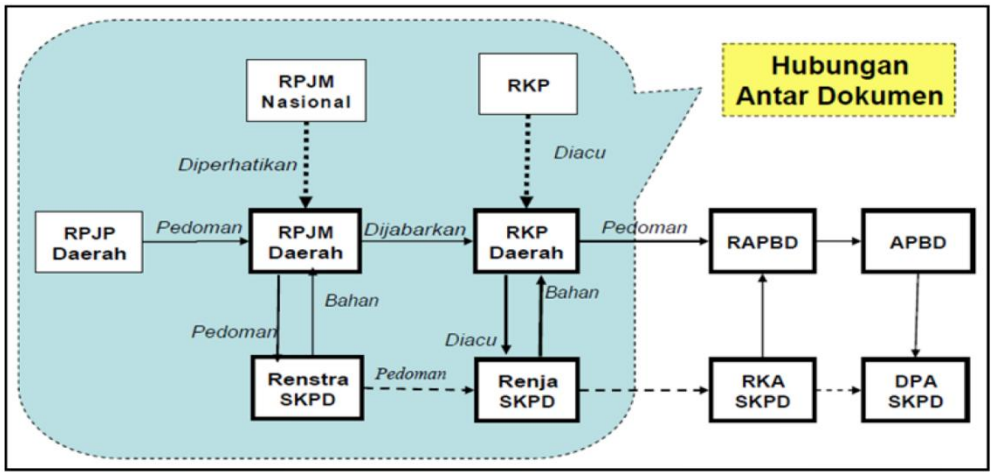

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah

pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Rencana Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang PariamanTahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel 2.1

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	Dokumen	22,860.545,00	11.073.000,00	48,44
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	Dokumen	3.290.000,00	580.000,00	17,63
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100%	Laporan	1.798.200.00	910.000,00	50,61
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%	Laporan	115.598.460,00	39.620.000,00	34,27
	JUMLAH	6	6			**143547205,00**	**52.183.000,00**	

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Tabel 2.2

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Jalan								
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
1	Survey Kondisi Jalan /Jembatan	2	2	100%	Dokumen	598.696.500,00	517.621.086,00	86,46
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	70,14	70,14	100%	Km	1.725.937.658,00	1.712.981.530,-	99,25
	JUMLAH					**2.324.634.158**	**2.230.602.616**	

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Tabel 2.3

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penyelenggaraan Jalan								
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
1	Rehabilitasi Jalan	25,69	46,16	184%	Km	40.734.933.165,00	39.116.219.852,00	96,03
2	Rehab Jembatan	190	199	109%	Meter	2.640.391.567,00	1.191.547.063,00	45,13%
	JUMLAH					**43.375.324.732**	**40.307.766.915**	

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. memaksimalkan sumber daya yang tersedia
b. melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait
c. dukungan anggaran yang memadai serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan turut berkontribusi terhadap tercapainya target yang telah ditetapkan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan
b. Kurangnya kapasitas SDM dalam hal analisis perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, terutama dalam menyusun indikator kinerja yang terukur dan relevan.

c. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih atau kekosongan kegiatan dalam beberapa bidang.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026:

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2026 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun

2026 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2026 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.

d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

   Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

   Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.4 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pencapaian Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2025	Realisasi Renja SKPD 2025	Tingkat Realisasi	(Renja SKPD tahun 2026)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
1	**03**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstradan Renja Perangkat Daerahyang tersusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAYang Tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
1	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAPerubahan Yang Tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
1	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00

1	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan CapianKinerja Yang tersusun, JumlahLaporan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD (LAKIP, LPPD)	2 Lap	1 Lap	2 Lap	1 Lap	100,00	2 Lap	2 Lap	100,00
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
1	**03**	**01**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN DPUPR Kab.Padang Pariaman Jumlah TPP ASN DPUPR Kab.Padang Pariaman	104 Orang	69 Orang	104 Orang	65 Orang	100,00	104 Orang	62 orang	100,00
1	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasikeuangan yangdibayarkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuanganakhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
1	03	01	2,03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
1	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00
1	***03***	***01***	***02.05***		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
1	03	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yangmengikuti pendidikan danpelatihan formal	20 Orang	14 Orang	20h Orang	14 Orang	70,00	20 Orang	3 Orang	15,00

1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM Aparatur yangmengikuti bimbingan teknisperaturan perundang-undangan	100	Orang	0	Orang	100	Orang	0	Orang	0,00	100 Orang	0 Orang	100,00
1	***03***	***01***	***02.06***		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrikyang disediakan	20	Paket	20	Paket	20	Paket	0	Paket	0,00	20 Paket	0 Paket	0,00
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangdiadakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100,00	20 Unit	0 Unit	0,00
1	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan kebersihan danrumah tangga yangdisediakan	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100	Paket	100,00	100 Paket	0 Paket	0,00
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaandan PeraturanPerundang-Undanganyang disediakan	500	Dok	500	Dok	500	Dok	0	Dok	0,00	500 Dok	0 Dok	0,00
1	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaanmakanan dan minumantamu	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	1 Laporan	0 Laporan	0,00
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasidan konsultasi yang diikuti Jumlah rapat rapat koordinasidan konsultasi yangdilaksanakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
1	***03***	***01***	***2,08***		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yangditindaklajuti	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 laporan	100,00
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik,telepon dan air yang dibayar	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
1	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedungkantor kerja yang terpelihara	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00

1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenagapendukung perkantoranyang dibayarkan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
1	***03***	***01***	***2,09***		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
1	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara	37	Unit	37	Unit	37	Unit	37	Unit	100,00	37 Unit	37 Unit	100,00
1	03	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yangdioperasikan/terpelihara	15	Unit	9	Unit	15	Unit	9	Unit	100,00	15 Unit	9 Unit	100,00
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor danbangunan lain yangterpelihara/terehabilitasi	10	Unit	5	Unit	10	Unit	5	Unit	100,00	10 Unit	5 Unit	100,00
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana danprasarana gedung kantordan bangunan lain yangterpelihara/terehabilitasi	5	Unit	1	Unit	5	Unit	1	Unit	100,00	5 Unit	1 Unit	100,00
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**													
1	***03***	***02***	***2,01***		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**													

1	03	02	2,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bangunan perkuatantebing yang dibangun	1 Km	1 Km	1 Km	0,2 Km	100,00	1 Km	0 km	100,00
1	***03***	***02***	***2,02***		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
1	03	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaanteknis dan dokumen lingkunganhidup untuk konstruksi irigasi danrawa	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0 Dok	00,00	4 Dok	0 Dok	100,00
1	03	02	2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang terpelihara	2 Km	2 Km	1 Km	1,199 m	102%	2 Km	0 Km	100,00
1	03	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yangterpelihara/tereha bilitasi	3 Km	0.426 Km	3 Km	3,2 Km	102 %	3 Km	0 Km	100,00
1	03	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yangOperasi dan dipelihara	0,5 Km	0,5 Km	0.5 Km	26 Km	100,00	0,5 Km	0 Km	100,00
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**									
1	***03***	***03***	***2,01***		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**									
1	03	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis SPAM yangtersusun	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	25,00	4 Dok	0 Dok	100,00
1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM JaringanPerpipaan di Kawasan	600 SR	600 SR	600 SR	1.091 SR	100,00	900 SR	0 SR	100,00

						Perdesaanyang terbangun									
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**										
1	***03***	***05***	***2,01***		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**										
1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ yang tersusun	4 Dok	0 Dok	4 Dok	0 Dok	0,00	4 Dok	0 Dok	100,00	
1	03	05	2,01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air LimbahTerpusat skala permukiman yangdirehabilitasi/ditingkatkan	857 RT	0 RT	1,143 RT	375 RT	32,80	1,286 RT	0 RT	100,00	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**										
1	***03***	***06***	***2,01***		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**										
1	03	06	2,01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkunganyang dibangun	500 M	800 m	500 m	35 m	7,00	500 m	0 m	100,00	

1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**										
1	***03***	***08***	***2,01***		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**										
1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Jasa tim TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1Dokumen	1 Dokumen	100,00
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00	10 Unit	10 Unit	100,00
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**										
1	***03***	***10***	***2,01***		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**										
1	03	10	2,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen penilaian jalan dan jembatan yang dibuat	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun/terpelihara/terehabilitasi	29,98 Km	32.935 Km	29,98 Km	27,715 Km	97,8	29,98 Km	29,98 Km	100,00
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang terbangun/terpelihara/terehabilitasi	25,61 Km	25,314 Km	25,69 Km	42,5 Km	168,53	25,69 Km	0 Km	100,00

1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	10	Km	10	Km	100	Km	70,14	Km	71,00	100 Km	20 Km	20,00
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	10	Unit	4	Unit	10	Unit	0	Unit	0,00	100 m	0 M	0,00
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yangditingkatkan/terpelihara	190	M	98	M	190	M	198	M	108,00	190 m	0	0,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota													
1	03	12	2,01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yangmendapat persetujuan subtansi	2	Dok	0	Dok	2	Dok	2	Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
1	03	12	2,01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakanrencana tata ruang yangtersusun	2	Dok	0	Dok	2	Dok	2	Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
1	03	12	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan danPeraturan PerundangundanganBidang Penataan Ruang	4	Kali	0	Kali	4	Kali	0	Kali	0,00	4 Kali	4 Kali	100,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen LaporanKoordinasi penataan ruangdaerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 11 November 2016. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tugas pokok: ***"Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas Disentralisasi***".

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II yang berada di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab pada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a). Tujuan :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

b). Sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik

3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan
4. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

c). Indikator Kinerja :

1. PersentaseTingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
3. Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik
4. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
6. Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman
7. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan
8. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 2.5 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator kinerja Utama tahun 2023	Indikator kinerja Utama tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%	83,31 %	97%	98%	76,57%	83,59%	83,59%	83,59 %	Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan.
2	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%	71%	73%	74%	65,59%	66,62%	66,62%	66,62 %	Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%	70%	71,04 %	71,08%	68,50%	66,77%	66,77%	66,77 %	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.
4	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70%	75%	83%	84%	72,86%	82,10%	82,10%	82,10 %	Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala,

Analisis kinerja pelayanan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap	Persentase tingkat pemantapan jalan (IKU)	71.00 %	68.00 %	95.77%	Berhasil
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten (IKU)	70.00%	66.77%	95.39%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	75.00%	24.18%	32.24%	Tidak Berhasil
4	Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis	65.00%	60.00%	92.31%	Berhasil
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	75.00%	90.00%	120.00$	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	95.00%	83.39%	87.99%	Cukup Berhasil

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
6	Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah	93.00%	76.57%	82.33	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat	A	B		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPUPR pada tahun 2024 secara keseluruhan dapat diinterpretasikan dengan Berhasil dengan rata-rata capaian dari keempat indikator tersebut adalah 86,58% dimana capaian realisasi indikator Presentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten sebesar 95,77% dengan interprestasi “Berhasil”, capaian realisasi indikator presentase irigasi kabupaten sebesar 95,39% dengan interprestasi “berhasil”. Capaian realisasi indikator presentase drainase dalam kondisi baik sebesar 32,24% dengan interprestasi “tidak berhasil”. Capaian realisasi indikator pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan sebesar 92,31% dengan interprestasi “berhasil”. Capaian realisasi indikator persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 90,86% dengan interprestasi “Berhasil” dan capaian realisasi indikator presentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 99,24% dengan interprestasu “Cukup Berhasil”.

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

Capaian realisasi indikator presentase drainase dalam kondisi baik sebesar 32,43% dengan interpretasi “tidak berhasil”.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator kinerja Utama tahun 2023	Indikator kinerja Utama tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%	83,31 %	97%	98%	76,57%	83,59%	83,59%	83,59 %	Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan.
2	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%	71%	73%	74%	65,59%	66,62%	66,62%	66,62 %	Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%	70%	71,04 %	71,08%	68,50%	66,77%	66,77%	66,77 %	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.
4	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70%	75%	83%	84%	72,86%	82,10%	82,10%	82,10 %	Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala,

Dari Tabel diatas bisa dijelaskan:

IKU 1. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

IKU 1 merupakan Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 sub kegiatan :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyusunan rencana strategis dan teknis SPAM.

Dengan Total anggaran program Rp. 3.010.326.250,- Realisasi anggaran Rp. 2.824.378.319,- Persentase realisasi anggaran 93,82%

Faktor Keberhasilan

1. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik.
2. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.

Srategi Pemecahan Masalah

1. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan SPAM di tingkat masyarakat.
2. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
3. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SPAM

Foto Dokumentasi

IKU 2. Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang

IKU 2 merupakan Program Penyelenggaraan jalan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang terdiri atas 6 sub kegiatan :

1. Survei kondisi jalan / jembatan
2. Pembangunan jalan
3. Rehabilitasi jalan
4. Pemeliharaan rutin jalan
5. Pembangunan jembatan
6. Rehabilitasi jembatan.

Dengan total anggaran program Rp. 95.324.686.939,- Realisasi Rp. 84.243.216.803,- Persentase Realisasi anggaran 88,38%

Faktor Keberhasilan

1. Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui;
2. Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.

Faktor Penghambat

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana

Foto Dokumentasi

IKU 3. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

IKU 3 merupakan Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kabupaten/kota, yang terdiri atas 4 sub kegiatan :

1. Pembangunan jaringan irigasi;
2. Rehabilitasi jaringan irigasi,
3. Peningkatan Jaringan Irigasi ,
4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Total Anggaran Program Rp.14.493.210.393,- Realisasi anggaran Rp.10.767.592.734,- Persentase realisasi anggaran 74,29%

Faktor Keberhasilan

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.
2. Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

Faktor Penghambat

1. Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku.
2. Banyaknya Sumber daya Air yang terletak pada tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemda dapat mengelola SDA secara optimal.

Srategi Pemecahan Masalah

1. Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigas

Foto Dokumentasi

IKU 4. Persentase Ketaatan terhadap RTRW

IKU 4 merupakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan,

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Total Anggaran Program : Rp. 300.426.100,- dengan realisasi Rp. 256.165.608,- Persentase realisasi anggaran 85,27%

Faktor Keberhasilan

1. Adanya kolaborasi Akademisi, Birokrasi, Dunia Usaha, Masyarakat (NGO Lingkungan) dan Dunia Pers dalam penyusunan rencana rinci Tata Ruang
2. Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas OPD

Faktor Penghambat

1. Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidak seimbangan kepentingan Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Institusional).
2. Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang
3. Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat

Srategi Pemecahan Masalah

1. Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaaan).
2. Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu.
3. Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Penyusunan Kajian tata ruang yang sesuai dengan peruntukan lahan dan fiungsinya.

Foto Dokumentasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang

berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Tingkat Kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari 11 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
    1. Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
    2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
    3. Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang
    4. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
    5. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
    6. Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :
    1. Langkanya keberadaan mata air dan air tanah dengan kualitas yang baik
    2. Rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah.
    3. Sulitnya akses lokasi pekerjaan
    4. adanya penolakan beberapa titik/lokasi pekerjaan
    5. Tidak terselenggaranya bimbingan teknis untuk sertifikasi karena keterbatasan anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar

program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (T-C 31)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**116.319.611.092,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**39.192.286.198,98**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**116.319.611.092,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**39.192.286.198,98**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**116.319.611.092,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**39.192.286.198,98**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Survei Kepuasan Masyarakat**		**11.003.646.724,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Survei Kepuasan Masyarakat**		**13.647.795.800,00**
[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]		**Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)** **Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti** **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**100** **88.31**	**11.003.646.724,00**	**[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]**		**Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%)** **Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti** **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**100** **88.31**	**13.647.795.800,00**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				369.600.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	44.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1 Dokumen	37.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	60.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	178.600.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.250.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	7.408.620.883,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	6.872.706.183,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	495.914.700,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	42.123.735,00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	20 Unit	35.122.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	20 Unit	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	35.122.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	40.223.625,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah SKP ASN	70 Orang 5 Orang 10 Orang 70 Orang	140.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah SKP ASN	70 Orang 5 Orang 10 Orang 70 Orang	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	140.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	142.930.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	1000 Surat 1200 Surat	432.563.836,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	1000 Surat 1200 Surat	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	108.500.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	105.229.260,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	218.834.576,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	325.320.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	100 Persen	224.780.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	100 Persen	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	71.280.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	153.500.000,00		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	153.735.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100 Persen 100 Persen	782.472.955,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100 Persen 100 Persen	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	79.995.375,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	344.337.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.950.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	308.190.080,00		Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.263.220.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang terkelola Jumlah total nilai aset	100 Persen 100 Persen	1.610.487.050,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang terkelola Jumlah total nilai aset	100 Persen 100 Persen	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	52.930.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit	1.200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	246.556.550,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	111.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	110.489.400,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**13.593.139.500,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				
[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]		Persentase luas layanan irigasi Persentase peningkatan perlindungan kawasan pantai dari abrasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	13.60 48.19 67.47	13.593.139.500,00	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]		Persentase luas layanan irigasi Persentase peningkatan perlindungan kawasan pantai dari abrasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	13.60 48.19 67.47	2.623.340.500,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	9,94 Persen	1.471.686.500,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	9,94 Persen	692.702.000,00
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	1.471.686.500,00	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	692.702.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			75,54 Persen	12.121.453.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			75,54 Persen	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			2 KM	3.471.918.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			2 KM	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			2 KM	3.561.946.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			2 KM	

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	4.209.184.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	486.416.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	878.405.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**		**2.314.984.180,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**		**1.450.069.250,00**
[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]				2.314.984.180,00	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana, kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disetujui		1.450.069.250,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana, kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disetujui		1.450.069.250,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	300.960.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	290.330.000,00
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1000 Liter/Detik	2.014.024.180,00	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1000 Liter/Detik	1.159.739.250,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		**-**		**1.700.000.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**-**		**2.100.000.000,00**
[Meningkatnya layanan persampahan regional]		Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	62.00	1.700.000.000,00	[Meningkatnya layanan persampahan regional]		Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	62.00	2.100.000.000,00
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan		2.100.000.000,00	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan		2.100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**		**4.478.355.500,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**		**368.538.500,00**
[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]				4.478.355.500,00	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-		4.478.355.500,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-		368.538.500,00
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		4.478.355.500,00	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		368.538.500,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		**Persentase Drainase dalam kondisi baik**		**4.009.123.980,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase Drainase dalam kondisi baik**		**0,00**
[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	26.48	4.009.123.980,00	[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	26.48	0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase dengan Kondisi Baik	0,85	4.009.123.980,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase dengan Kondisi Baik	0,85	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	939.770.000,00	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	0,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000 Meter	3.069.353.980,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	1000 Meter	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		**Persentase Infrastruktur yang meningkat pada permukiman di Kawasan Strategis**		**856.477.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		**Persentase Infrastruktur yang meningkat pada permukiman di Kawasan Strategis**		**856.477.000,00**
[Meningkatnya Kualitas Infrastruktru Pemrukiman]				856.477.000,00	[Meningkatnya Kualitas Infrastruktru Pemrukiman]				
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten		856.477.000,00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten		856.477.000,00

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	300 Rumah Tangga	856.477.000,00	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	300 Rumah Tangga	856.477.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				
[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	62.00	17.020.875.000,00	[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	62.00	1.748.253.801,98
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung yang mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat Lain fungsi bangunan gedung	750 Unit	17.020.875.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung yang mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat Lain fungsi bangunan gedung	750 Unit	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	16.505.450.000,00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	

Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	515.425.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		**Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan** **Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan**		**60.203.012.708,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan** **Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan**		**14.901.817.242,00**
[Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap]				60.203.012.708,00	[Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap]				
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Panjang Jalan yang telah direkam update data Jumlah panjang jembatan yang telah direkam update data Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik	2072,4 KM 2973,8 Meter 10 Unit	60.203.012.708,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Panjang Jalan yang telah direkam update data Jumlah panjang jembatan yang telah direkam update data Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik	2072,4 KM 2973,8 Meter 10 Unit	14.901.817.242,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2072,4 KM	637.723.940,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2072,4 KM	552.359.500,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60 KM	1.341.087.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60 KM	1.215.001.000,00

Pembangunan Jalan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	30 KM	27.230.461.768,00	Pembangunan Jalan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	30 KM	2.633.560.000,00
Rehabilitasi Jalan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26 KM	19.618.780.000,00	Rehabilitasi Jalan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26 KM	1.900.361.742,00
Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	190 Meter	1.974.960.000,00	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	190 Meter	
Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	100 Meter	9.400.000.000,00	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	100 Meter	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Bersertifikat**		**-**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Bersertifikat**		**277.725.655,00**
[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.25 100 4.32	-	[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.25 100 4.32	277.725.655,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100 Orang	-	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100 Orang	

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	-	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	13.800.000,00
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	-	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 Surat	-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 Surat	57.105.655,00
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	-	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	41.805.655,00
Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	15.300.000,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket	-	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket	0
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	-	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	0

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital**		**1.139.996.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital**		**1.218.268.450,00**
[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]			55.00	1.139.996.500,00	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]			55.00	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disetujui	2 Dokumen	189.996.500,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disetujui	2 Dokumen	219.996.322,00
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	149.996.500,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	149.996.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan	20 Kali	300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan	20 Kali	
Penyusunan Peta Dasar		Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	100.000.000,00	Penyusunan Peta Dasar		Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	

Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota		-	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	20 Kali	47.326.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan	20 Kali	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan		299.999.612,00
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			2 Sistem Informasi	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Sistem Informasi	200.000.000,00	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Laporan	199.999.862,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang dilaksanakan	1 Laporan	450.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang dilaksanakan	2 Dokumen	450.000.272,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	300.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 Dokumen	300.000.100,00

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100 Dokumen	150.000.000,00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100 Dokumen	150.000.172,00

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Namun dalam proses ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2021-2026, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		**Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan**	**Padang Pariaman Berjaya**
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Beralkhlak Mulia, Sehat pengetahuan, terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama berdasarkan Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah serta memeliharan kerukunan ketentraman dan ketertiban
2.	Struktur Ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas	Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasiskan Peberdayaan Masyarakat
4	Mencapai Lingkugan Hidup yang Berkelanjutan	Eningkatkan usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Mengah serta Ekonomi Digital	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan Terampil serta Berdaya Saing Melalui Peninglatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratif Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional,

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		**Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan**	**Padang Pariaman Berjaya**
			Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
6	Penegakkan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat dan Terpecaya	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal
7	Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas	Meningkatkan sumber-sumber Pendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi melalui Penciptaan Illim yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		**Tema**	**Tema**
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		**Tema**	**Tema**
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan
4. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan saran sangat diperlukan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan dan sasarananya dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajeman dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1. Persentase Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	64,94%
		2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	2. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Ha	68,17%
		3. Kapasitas Air Baku (m3/detik)		2. Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik	%	25,18%
			3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan	1, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	% %	77,37%
				2. Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	9,33%
			4. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	%	92,00%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	77,80%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

   Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

   Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

   Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2026 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat**: Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah**: Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat**: Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

   Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2026 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

   Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

   Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2026 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang

dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
		Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**39.192.286.198,98**		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**39.192.286.198,98**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**39.192.286.198,98**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Survei Kepuasan Masyarakat	100 persen 100 Persen 80 Nilai	13.647.795.800,00		
[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 88.31	13.647.795.800,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	42.123.735,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	40.223.625,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	142.930.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	325.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	153.735.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.263.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
-	-	-	13.647.795.800,00		

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	110.489.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Persentase luas layanan irigasi Persentase peningkatan perlindungan kawasan pantai dari abrasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	15.85 48.19 68.17	2.623.340.500,00		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	9,94 Persen	692.702.000,00		
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	692.702.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	486.416.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Persen	1.450.069.250,00		
[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disetujui	1 Laporan	1.450.069.250,00		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	290.330.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1000 Liter/Detik	1.159.739.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

				Semua Kel/Desa	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	2.100.000.000,00		
[Meningkatnya layanan persampahan regional]	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	64.00	2.100.000.000,00		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					
	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	368.538.500,00		
[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	368.538.500,00		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	3 M^3/Hari	368.538.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

				Semua Kel/Desa	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	85 Persen	0,00		
[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	25.18	0,00		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur yang meningkat pada permukiman di Kawasan Strategis	50 Persen	856.477.000,00		
[Meningkatnya Kualitas Infrastruktru Pemrukiman]					
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	10 Unit	856.477.000,00		
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					

	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	300 Rumah Tangga	856.477.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	64.00	1.748.253.801,98		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	0,028 % 0,05 %	14.901.817.242,00		
[Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap]					
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang telah direkam update data Jumlah panjang jembatan yang telah	2072,4 KM 2973,8 Meter 10 Unit	14.901.817.242,00		

	direkam update data Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik				
Survey Kondisi Jalan/Jembatan					
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2072,4 KM	552.359.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pemeliharaan Rutin Jalan					
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60 KM	1.215.001.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pembangunan Jalan					
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	30 KM	2.633.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Rehabilitasi Jalan					
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26 KM	1.900.361.742,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Rehabilitasi Jembatan					
Pembangunan Jembatan					
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Bersertifikat	55 Persen	277.725.655,00		
[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.35 100 6.02	277.725.655,00		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	13.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 Surat	57.105.655,00		

Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	41.805.655,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI					
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	15.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
-	-	-	277.725.655,00		
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100 Persen	1.218.268.450,00		
[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]					
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disetujui	2 Dokumen	219.996.322,00		
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					

Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	2 Laporan	149.996.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
Penyusunan Peta Dasar					
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.326.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan	20 Kali	299.999.612,00		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					
	0	20 0	99.999.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Sistem Informasi	199.999.862,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah yang dilaksanakan	1 Laporan	450.000.272,00		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	300.000.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100 Dokumen	150.000.172,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			39.192.286.198,98				0	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			39.192.286.198,98				0	
	1	03				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			39.192.286.198,98				0	
1	1	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Survei Kepuasan Masyarakat	100 persen 100 Persen 80 Nilai	13.647.795.800,00			-	0,00	
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 88.31	13.647.795.800,00				0,00	

	1	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.250.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	42.123.735,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	40.223.625,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	142.930.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	325.320.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	153.735.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.263.220.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						-	-	-	13.647.795.800,00				0,00	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	110.489.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								

						[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Persentase luas layanan irigasi Persentase peningkatan perlindungan kawasan pantai dari abrasi Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	15.85 48.19 68.17	2.623.340.500,00				0,00	
	1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	9,94 Persen	692.702.000,00			-	0,00	
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	692.702.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan								
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3 KM	486.416.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

										Semua Kel/Desa	BIDANG PEKERJAAN UMUM			PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
3	1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Persen	1.450.069.250,00			-	0,00	
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]								
	1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Rencana, kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disetujui	1 Laporan	1.450.069.250,00			-	0,00	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	290.330.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1000 Liter/Detik	1.159.739.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	-	-	2.100.000.000,00			-	0,00	

						[Meningkatnya layanan persampahan regional]	Persentase kondisi baik infrastruktur persampahan	64.00	2.100.000.000,00				0,00	
	1	03	04	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**								
	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	3 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	368.538.500,00			-	0,00	
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]								
	1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	368.538.500,00			-	0,00	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	3 M^3/Hari	368.538.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase dalam kondisi baik	85 Persen	0,00			-	0,00	
						[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	25.18	0,00				0,00	

	1	03	06	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 M	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan								
7	1	03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase Infrastruktur yang meningkat pada permukiman di Kawasan Strategis	50 Persen	856.477.000,00			-	0,00	
						[Meningkatnya Kualitas Infrastruktru Pemrukiman]								
	1	03	07	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten	10 Unit	856.477.000,00			-	0,00	
	1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	300 Rumah Tangga	856.477.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								
						[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	64.00	1.748.253.801,98				0,00	

	1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
9	1	03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan Persentase jembatan kabupaten yang ditingkatkan	0,028 % 0,05 %	14.901.817.242,00			-	0,00	
						[Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap]								
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang telah direkam update data Jumlah panjang jembatan yang telah direkam update data Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik	2072,4 KM 2973,8 Meter 10 Unit	14.901.817.242,00			-	0,00	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2072,4 KM	552.359.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

										Semua Kel/Desa				PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan								
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60 KM	1.215.001.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan								
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	30 KM	2.633.560.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan								
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	26 KM	1.900.361.742,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan								
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan								
10	1	03	11			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Bersertifikat	55 Persen	277.725.655,00			-	0,00	

						[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.35 100 6.02	277.725.655,00				0,00	
	1	03	11	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	13.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 Surat	57.105.655,00			-	0,00	
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	41.805.655,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI								
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	15.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						-	-	-	277.725.655,00				0,00	
	1	03	11	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**								
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
11	1	03	12			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100 Persen	1.218.268.450,00			-	0	
						[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]								
	1	03	12	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disetujui	2 Dokumen	219.996.322,00			-	0	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar								
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								

	J U M L A H								39.192.286.198,98				0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota								
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.326.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah yang dilaksanakan	20 Kali	299.999.612,00			-	0	
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang								
							0	20 0	99.999.750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Sistem Informasi	199.999.862,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	12	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah yang dilaksanakan	1 Laporan	450.000.272,00			-	0,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	300.000.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100 Dokumen	150.000.172,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 22 September 2025

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

EL ABDES MARSYAM, ST, MM
NIP. 19701219 1998 03 1 004

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dalnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	